

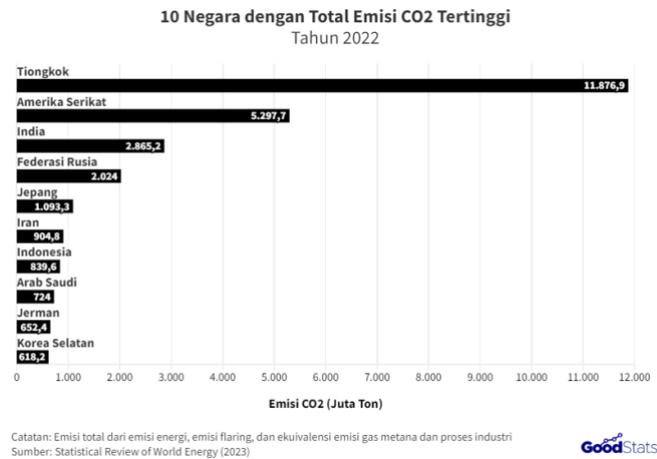
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Baru baru ini dunia online diramaikan dengan tagar Global Boiling atau pendidihan global. Pernyataan ini menjadi ramai setelah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres (Rachman, 2023). Beliau juga menuturkan bahwa musim panas tahun 2023 merupakan musim panas yang paling kejam dari pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi bencana besar bagi bumi. Selain itu, berdasarkan pengamatan National Aeronautics and Space Administration (NASA), suhu global telah meningkat sebesar $1,4^{\circ}\text{C}$ sejak tahun 1880 (NASA, 2024). Tidak hanya itu, World Meteorological Organization (WMO) menyatakan bahwa bumi telah mengalami bulan terpanas selama 120.000 tahun yang jatuh pada Juli 2023 yang lalu (acciona, 2023).

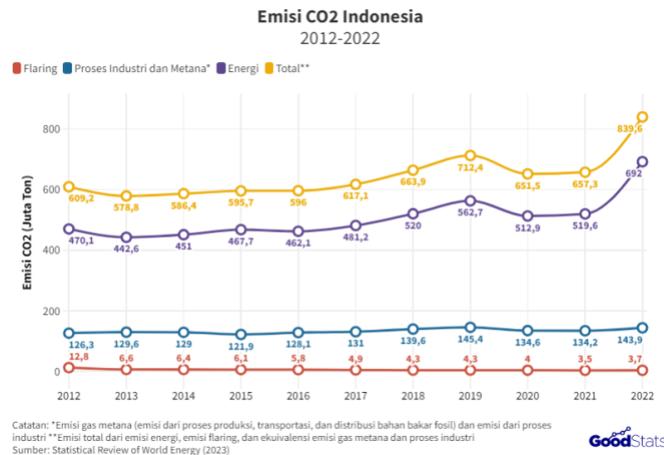
Menurut (European Commission, 2024), penyebab utama dari perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi adalah gas rumah kaca. Karbon dioksida (CO_2), Metana (CH_4), dinitro oksida (N_2O), dan chlorofluorocarbon (CFC) merupakan gas rumah kaca yang dapat terbentuk secara alami. Namun, aktivitas manusia seperti deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil, dan peningkatan aktivitas industri meningkatkan konsentrasi gas gas ini di atmosfer (European Commission, 2024; Putri Halimah & Yanto, 2018).



Gambar 1.1 Peringkat 10 Teratas bagi Negara dengan Total Emisi CO2 Tertinggi

Sumber: (Shafina, 2023)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di dunia. Tinjauan tahun 2023 dalam Statistical Review of World Energy menunjukkan, dari 10 negara dengan emisi karbon tertinggi di dunia, Indonesia berada di urutan ke-5. Emisi CO2 ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan emisi gas metana. Berdasarkan data, emisi karbon dioksida Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, jumlah emisi mencapai 839,6 juta ton, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 557,3 juta ton.



Gambar 1.2 Jumlah Emisi CO2 Indonesia 2012-2022

Sumber: (Shafina, 2023)

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi emisi ini dengan cara membuka pasar karbon. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Salah satu instrumen yang ditawarkan dalam peraturan ini sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon adalah perdagangan karbon. Perdagangan karbon dianggap sebagai instrumen yang matang dengan mekanisme cap-and-trade yang memungkinkan entitas yang intensif menghasilkan karbon untuk membeli kredit karbon dari entitas lainnya (Tumiwa et al., 2023).

Laporan keberlanjutan merupakan dokumen yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan dengan tujuan untuk menginformasikan kinerja bisnis dan dampaknya dalam konteks keberlanjutan (Anggi, 2020). Melalui sustainability report, perusahaan dapat mempertimbangkan bagaimana isu-isu non-keuangan, seperti pelayanan pelanggan dan perubahan iklim, dapat mempengaruhi proses penciptaan nilai (value creation) (ACCA, n.d.). Selain itu, regulasi untuk mengatur

hal ini juga telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 10 ayat 1, OJK menegaskan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan.

Sayangnya, dalam konteks pengungkapan emisi karbon di Indonesia, belum ada peraturan yang secara rinci mengatur komponen-komponen yang harus diungkapkan, termasuk emisi karbon itu sendiri. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan dalam sektor dengan emisi karbon tinggi diharapkan berperan aktif dalam mengurangi dampak lingkungan. Salah satu langkah penting adalah mengungkapkan secara terbuka data emisi karbon sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan (Nasih et al., 2019). Meskipun begitu, Simamora et al. (2022) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang transparan terkait emisi karbonnya cenderung lebih menarik bagi investor domestik maupun internasional. Selanjutnya, peneliti lain, Andrian & Kevin (2021) menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan transparansi informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap perubahan iklim dan membantu mengurangi risiko seperti ancaman terhadap reputasi perusahaan dan proses hukum yang dapat mungkin terjadi. Namun, pernyataan-pernyataan peneliti tersebut tidak didukung oleh Pradipta et al. (2022), Tamara dan Khairani (2023). Dalam studinya, dua peneliti tersebut menemukan bahwa penerbitan laporan keberlanjutan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan kata lain, hasil tersebut memberikan implikasi bahwa ada tidaknya informasi dalam laporan keberlanjutan tidak akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

Melihat ke belakang, isu perubahan iklim dimulai pada tahun 2015 dengan Perjanjian Paris yang mencakup tujuan utama untuk pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius, mencapai nol emisi bersih, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mewajibkan negara maju memberikan dukungan keuangan kepada negara berkembang dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim (United Nations Climate Change, n.d.).

Selain itu, pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai panduan global untuk pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, dengan 17 tujuan utama (United Nations Department of Economics and Social Development, n.d.). Tujuan-tujuan ini diadopsi oleh PBB sebagai panggilan global untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa pada tahun 2030, seluruh manusia dapat menikmati kedamaian dan kemakmuran (United Nations Department of Economics and Social Development, n.d.).



Gambar 1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

Sumber: (United Nations, n.d.)

Lalu, secara spesifik, dari sektor ekonomi, dibentuklah Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. GRI lahir sebagai tanggapan atas kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak Exxon Valdez pada tahun 1989. Organisasi ini berfokus pada penciptaan sistem akuntabilitas yang diterapkan untuk menjamin perusahaan mematuhi prinsip-prinsip perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, cakupan ini diperluas untuk mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola. (Global Reporting Initiative, n.d.).

Pedoman pertama yang dihasilkan oleh GRI, yang disebut dengan GRI Guidelines (G1), dikeluarkan pada tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2002, kantor sekretariat GRI dipindahkan ke Amsterdam lalu diluncurkanlah versi pedoman yang telah diperbarui, yaitu GRI Guidelines (G2). Seiring dengan peningkatan

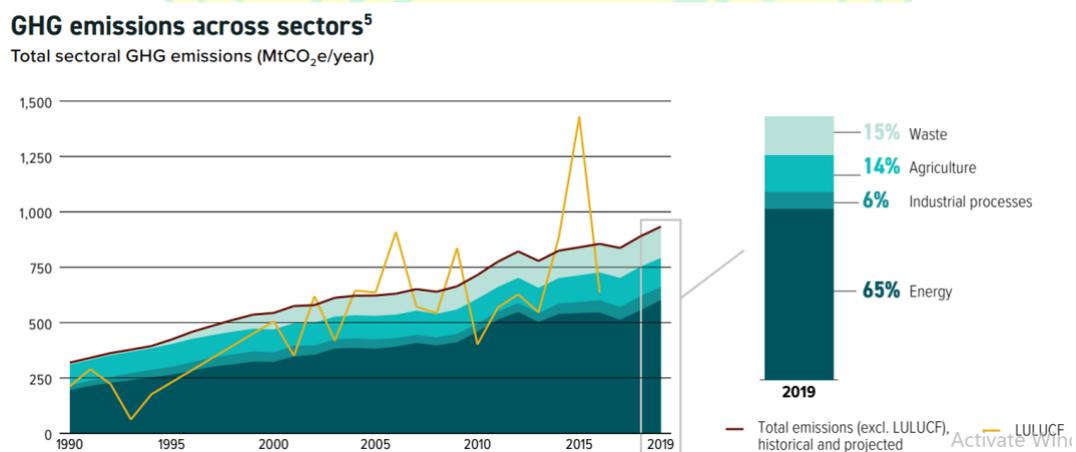
permintaan untuk pelaporan GRI dan penggunaannya oleh berbagai organisasi, pedoman ini terus diperluas dan disempurnakan, menghasilkan G3 pada tahun 2006 dan G4 pada tahun 2013 (Global Reporting Initiative, n.d.). Selain itu, GRI juga mengembangkan pedoman yang difokuskan pada sektor tertentu untuk memfasilitasi pelaporan yang lebih konsisten mengenai dampak perusahaan atau organisasi pada sektor yang lebih spesifik.

Kemudian, sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memilih untuk mengadopsi Standar GRI dalam melakukan pelaporannya (Ekasari et al., 2021). Sebuah laporan PwC, Laporan Asia Pacific Sustainability Counts II, pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan (80%) di Indonesia telah mengadopsi Standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan mereka pada tahun 2022. (PWC, 2023)

Kembali pada pembahasan mengenai pengungkapan emisi karbon, menurut lembaga Climate Transparency, Indonesia dinilai tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencapai tujuan perjanjian Paris terkait pembatasan kenaikan suhu maksimum 1.5°C. Evaluasi mereka menunjukkan bahwa target dan aksi kebijakan Indonesia terkait perubahan iklim masih dianggap "sangat tidak memadai". Dalam laporan yang sama, Climate Transparency menyimpulkan bahwa kebijakan dan komitmen iklim Indonesia justru berkontribusi pada peningkatan emisi karbon, bukan penurunan, dan tidak konsisten dengan batas suhu 1.5°C yang disepakati dalam perjanjian Paris (Climate Transparency, 2022). Gambar 1.2 memperlihatkan tren peningkatan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor Indonesia selama periode

1990 hingga 2019. Lembaga Climate Transparency menggambarkan bahwa total emisi gas rumah kaca di Indonesia meningkat sebesar 193% pada periode tersebut.

Dalam penelitiannya, Ramadhani dan Venusita (2020), berpendapat bahwa ada dua jenis industri: industri intensif dan industri non-intensif. Perusahaan yang termasuk kedalam industri intensif meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang seperti pertambangan, energi, material, utilitas, konstruksi dan transportasi yang memang mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap lingkungan. Sementara itu, industri non-intensif, seperti sektor keuangan dan kesehatan memiliki dampak yang lebih rendah. Industri intensif cenderung menghasilkan emisi dengan volume yang lebih besar daripada industri non-intensif. Selain itu, berdasarkan laporan Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi (2020), sektor lain yaitu sektor industrial juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah emisi GRK Indonesia, yaitu 21,46% pada tahun 2019. Oleh karena itu, tindakan nyata untuk mengurangi emisi karbon menjadi sangat penting, terutama dari sektor-sektor tersebut.



Gambar 1.4 Emisi CO₂ Indonesia tahun 2012-2022

Sumber: (Climate Transparency, 2022)

Penelitian ini didorong oleh dua jenis fenomena, yakni fenomena empiris (yang sudah dipaparkan) dan fenomena teoritis. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan. Pertama, penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon, menunjukkan hasil yang beragam. Wibowo et al (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan Putri Halimah dan Yanto (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan justru berpengaruh . Selain itu, jika dikaitkan dengan faktor lain seperti leverage, penelitian, Hapsari dan Prasetyo (2020) menemukan korelasi diantara keduanya. Namun hal tersebut dibantah oleh Wahyuningrum et al. (2022) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara leverage dan emisi karbon. Terakhir, dari perspektif tata kelola, keragaman hasil juga ditemukan pada penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan emisi karbon. Budiharta dan Kacaribu (2020) menemukan korelasi positif, sedangkan Solikhah et al. (2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan karena masih terdapat perbedaan dan kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya (yang tidak konsisten). Selain itu, kurangnya kebijakan dan kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon juga menjadi salah satu alasan yang dikemukakan para peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Sektor Non-Finansial yang Terdaftar di BEI”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan pada sektor non-finansial?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan pada sektor non-finansial?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan pada sektor non-finansial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan pada sektor non-finansial
2. Mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan pada sektor non-finansial
3. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan pada sektor non-finansial

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan, penelitian ini dapat membantu memperjelas pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon.
- b. Diharapkan, penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang keuangan dan lingkungan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi agar lebih aktif dalam bertanggung jawab dan mengurangi emisi karbonnya untuk mengurangi dampak operasi bisnis perusahaan pada perubahan iklim.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengkritisi pengungkapan emisi karbon dan mendukung perusahaan yang proaktif dalam hal tersebut.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat merancang regulasi yang dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang ada agar lebih transparan dalam mengungkapkan emisi karbonnya.

d. Bagi Media/ Jurnalis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu media/jurnalis untuk meningkatkan pemahaman publik tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan khususnya dalam konteks pengungkapan emisi karbon.